

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) dan perlakuan akuntansi di BMT UGT Sidogiri sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk berdasarkan akad *IMBT*, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan PSAK 107 tentang “Akuntansi *Ijarah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi *IMBT* tersebut secara umum telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 107.

Ketidaksesuaian tersebut berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan oleh penyewa (*musta'jir*) sedangkan seharusnya beban tersebut merupakan tanggung jawab pemberi sewa (*mu'jir*). Ketentuan perpindahan kepemilikan yang ditawarkan menggunakan opsi yang dibenarkan dalam PSAK 107, jika merujuk pada Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, ta'zir boleh dilakukan yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, ta'zir yang dimaksud adalah berupa Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, namun hal ini tidak diberlakukan oleh BMT.

Atas dasar ini disimpulkan bahwa untuk prinsip akuntansinya BMT UGT Sidogiri cabang Sepanjang belum sesuai dengan PSAK 107, dan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwah Dewan Syariah Nasional MUI dalam hal pengenaan denda.

Kata kunci: *Ijarah muntahiya bittamlik*, *baitul maal wat tamwil*, PSAK No. 107

## ABSTRACT

This research is aimed to find out the *IjarahMuntahiyaBittamlik* financing mechanism (IMBT) and the accounting treatment in BMT UGT Sidogiri as one of the Islamic Financial Institutions which has products based on the IMBT agreement and to analyze its compatibility with the prevailing regulations in Indonesia i.e. based on the SFAS 107, "Accounting of *Ijarah*". The result of the research shows that the implementation of this IMBT transaction, in general, is compatible with some issue which are regulated in that provision, even though there are some issues which have not compatible with the SFAS 107.

The incompatibility is in the regulation of maintenance expenses which has been carried out by tenant (*musta'jir*) whereas these expenses have to be borne by the owner (*mu'jir*). The provision of transfer of ownership has been offered by using options which have been justified by the SFAS 107, i.e. grant which has to be carried out at the Fatwah of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, the *ta'ziris* allowed to be conducted in order to make the customers more discipline in carrying out their liabilities, *ta'ziris* the sanction in the form of fine of sum of money in which the agreement is signed, but this is not carried out the BMT.

Based on this findings, it can be concluded that the accounting principles of BMT UGT SidogiriSepanjang branch has not compatible with the SFAS 107, and there is an incompatibility whit the provision of the Fatwah of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama in the imposition of fine.

**Keywords:** *Ijarahmuntahiyabittamlik, baitulmaalwattamwil, SFAS No. 107*